

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Pembangunan ekonomi kini bertujuan bukan hanya menitikberatkan pada ekonomi yang terus bertumbuh, namun juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperbaiki ketimpangan pendapatan, serta menurunkan angka kemiskinan. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya terpengaruh oleh faktor ekonomi dan faktor sosial (faktor non ekonomi) (Arsyad, 2014). Faktor ekonomi dibagi menjadi dua, yakni Sumber Daya Alam (SDA) yang menyangkut bahan-bahan baku modal ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM), yakni tenaga kerja yang menghasilkan barang atau jasa. Di samping itu, faktor non ekonomi (faktor sosial) dapat dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, sosial politik, dan sebagainya. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh penghasilan masyarakat yang meningkat, oleh karenanya akan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 diartikan sebagai keadaan ekonomi sosial individu ataupun kelompoknya yang tidak mampu untuk memenuhi hak-haknya secara mendasar seperti air bersih, pekerjaan, pendidikan, kebutuhan pangan, kesehatan, perumahan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat.

Munculnya kemiskinan tersebut dikarenakan perbedaan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Guna peningkatan kualitas SDM di sini, diperlukan pendidikan sebagai sarannya, karena pendidikan yang kian tinggi akan membuat semakin berkualitas Sumber Daya Manusia. Selain pendidikan, pelatihan juga merupakan sarana untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan seseorang untuk mengasah skill, pengetahuan, serta wawasan tenaga kerja. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin banyak pelatihan yang didapat oleh seseorang, maka akan meningkatkan skill dan wawasan sumber daya manusia yang mana hal ini dapat memperbesar peluang orang tersebut bersaing di dunia kerja. Dengan tingginya peluang seseorang dan terbukanya kesempatan kerja, maka akan meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan topik yang tidak ada habisnya untuk dibahas, termasuk Indonesia. Negara Indonesia memiliki jumlah kepadatan penduduk yang lumayan tinggi dan tingkat perekonomian yang beragam, tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2017, Indonesia memiliki penduduk miskin berjumlah 26,58 juta jiwa. Kemudian, menurun pada tahun 2018 sebesar 25,67 juta jiwa dan angka penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 24,79 juta jiwa (BPS, 2020). Dari angka-angka ini dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia periode 2017-2019 mengalami penurunan dengan tingkat penurunan 3% rata-rata per tahun (data diolah).

Menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode 2017-2019 tidak terlepas dengan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan termasuk di bidang ekonomi. Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh keberhasilan dari membangun Sumber Daya Manusia, dimana ini bisa diketahui dari meningkatnya kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat dimana indikatornya bisa dilihat dari meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Di Indonesia sendiri pada 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai persentase 70,81%, selanjutnya naik 71,39% pada 2018, seta pada 2019 IPM Indonesia meningkat sebesar 71,92% atau mengalami kenaikan sebesar 0,8% rata-rata per tahun (data diolah).

Menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode 2017-2019 juga erat kaitannya dengan pembangunan di bidang ekonomi. Keberhasilan perekonomian ini dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional Indonesia (PDB). Pada tahun 2017, PDB Indonesia sebesar 13.589.825,70 milyar rupiah yang kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 14.838.311,50 milyar rupiah dan pada tahun 2019 PDB Indonesia sebesar 15.833.943,40 milyar rupiah (BPS, 2020). Jadi dapat dikatakan bahwa selama periode 2017-2019, perekonomian Indonesia berkembang dengan laju pertumbuhan PDB sebesar 7,9% rata-rata per tahun (data diolah).

Begitu juga di Sumatera Barat, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat dalam periode yang sama juga mengalami penurunan. Total pada tahun 2017 untuk penduduk miskin di Sumatera Barat terhitung berjumlah 364,51 ribu jiwa,

kemudian tahun 2018 penduduk miskin berkurang dengan jumlahnya menjadi 357,13 ribu jiwa dan di tahun 2019 mencapai 348,22 ribu jiwa (BPS, 2020). Berdasarkan angka-angka yang dihasilkan, bisa diambil kesimpulan bahwasanya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat selama periode 2017-2019 mengalami penurunan sebesar 2% rata-rata per tahun (data diolah).

Menurunnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat selama periode 2017-2019 juga erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat bisa dijadikan tolak ukur perkembangan keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2017 yakni berjumlah 71,24% kemudian naik sebesar 71,73% pada 2018 dan tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 72,39% (BPS, 2020). Dapat dilihat dari angka-angka tersebut, dapat dikatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat mengalami kenaikan rata-rata 0.8% per tahun selama periode 2017-2019 (data diolah).

Selain dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat juga berhubungan dengan keberhasilan ekonomi dilihat dari meningkatnya PDRB Sumatera Barat. Selama periode 2017-2019 PDRB di Sumatera Barat mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2017 jumlah PDRB Sumatera Barat Rp 213.893.468,18, kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp. 230.571.985,59 dan pada tahun 2019 PDRB Sumatera Barat mencapai Rp 246.422.724,79 (BPS, 2020). Berdasarkan angka-angka tersebut dapat dikatakan bahwa PDRB di Sumatera Barat selama periode 2004-2019 mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan 7,25% rata-rata per tahun (data diolah).

Menurunnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat juga erat hubungannya dengan inflasi. Angka inflasi di Sumatera Barat periode 2017-2019 berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2017, inflasi Sumatera Barat sebesar 2.02%, lalu terjadi kenaikan di tahun 2018 sejumlah 2,60% dan tahun 2019 inflasi menurun 1,66%. Dari data tersebut, didapat kesimpulan bahwa perkembangan inflasi di Sumatera Barat selama periode 2017-2019 mengalami penurunan 3,65% rata-rata per tahun (data diolah).

Seperti halnya Indonesia dan Sumatera Barat, di Kota Padang jumlah penduduk miskinnya sepanjang periode 2017-2019 juga mengalami penurunan. Untuk tahun 2017, jumlah penduduk miskin Kota Padang berjumlah 44.750 jiwa, kemudian jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2018 sebesar 44.040 jiwa dan di tahun 2019 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 42.440 jiwa (BPS, 2020). Dari angka-angka tersebut dapat dikatakan bahwa di Kota Padang jumlah penduduk miskin selama periode 2017-2019 juga mengalami penurunan dengan laju penurunan 2,6% rata-rata per tahun (data diolah).

Menurunnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang sepanjang periode 2017-2019 erat kaitannya dengan keberhasilan pemerintah Kota Padang dalam menjalankan pembangunan di bidang ekonomi. Indikasi atas keberhasilan upaya tersebut dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Padang sepanjang periode yang sama. Kota Padang memiliki IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sejumlah 85,58% pada 2017, lalu pada 2018 angkanya naik menjadi 82,25% dan tahun 2019 juga meningkat sebesar 82,68%. Sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dimana pertumbuhan rata-ratanya adalah 0.67% per tahun pada periode 2017-2019. Hal ini menunjukkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia di Kota Padang cukup baik, dimana ini dilihat dari segi pendidikan, harapan hidup, daya beli, dan standar kelayakan hidup. Jika dikaitkan dengan pendidikan, semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan, maka akan semakin tinggi pendapatan masyarakat. Artinya semakin tinggi pendapatannya, maka kemiskinan juga akan menurun.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang sepanjang periode 2017-2019 juga erat kaitannya dengan keberhasilan yang terlihat dari meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang. Pada tahun 2017 PDRB Kota Padang sebesar Rp. 53.091.095,10, kemudian tahun 2018 angkanya naik menjadi Rp. 57.519.790,00 dan tahun 2019 mencapai Rp 62.457.554,20. Berdasar data tersebut bisa diketahui bahwa PDRB di Kota Padang selama periode 2017-2019 mengalami peningkatan 8,46% rata-rata per tahun. Hal ini mencerminkan keberhasilan Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Semakin tinggi PDRB, berarti pendapatan masyarakat semakin tinggi dan kesejahteraan meningkat yang pada gilirannya kemiskinan semakin menurun.

Selama periode yang sama, menurunnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang juga erat kaitannya dengan perkembangan inflasi di Kota Padang. Angka inflasi di Kota Padang berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2017 Inflasi sebanyak 2,11%, kemudian tahun 2018 naik menjadi 2,55% serta pada 2019 menurun kembali sejumlah 1,72%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan inflasi di Kota Padang selama periode 2017-2019 mengalami penurunan 5,85% rata-rata per tahun.

Mengacu uraian permasalahan yang sudah dipaparkan, apakah memang benar jumlah penduduk miskin di Kota Padang dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang indikatornya yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB, dan inflasi? Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam berbentuk skripsi yang judulnya : **“Analisis Faktor Ekonomi Terhadap Penduduk Miskin di Kota Padang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Supaya tujuan penelitian bisa dicapai, maka terdapat perumusan permasalahannya, yakni :

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai akan uraian rumusan masalahnya, tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di sini, yakni :

1. Menganalisis efek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Padang periode 2004-2020.
2. Menganalisis efek PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Padang periode 2004-2020.
3. Menganalisis efek inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Padang periode 2004-2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdapat beberapa bagian yang menjelaskan topik berdasarkan permasalahannya, sehingga penyusunan penulisannya mengacu sistematika, yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis pada bagian ini akan menerangkan terkait latar belakang masalah yang menjadi penyebab menurunnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang, rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian, tujuan penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis menjabarkan terkait teori rujukan utama yang mendukung hubungan antar variabel, penelitian terdahulu yang menjadi landasan utama penelitian ini, kerangka penelitian, serta diakhiri dengan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti menjabarkan terkait tujuan spesifik penelitian, waktu dan tempat, metode apa yang dipergunakan untuk penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, serta diakhiri dengan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini berisikan terkait gambaran umum, deskripsi variabel, hasil analisis data, serta interpretasi hasil analisis data.

BAB V : RINGKASAN DAN KESIMPULAN

Pada bagian ini penulis menjelaskan penutup yang berisikan ringkasan, implikasi kebijakan, dan rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA